

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu sektor wajib yang sedang berkembang di negara Indonesia karena sudah terbukti memberi dampak yang positif. Berbagai macam manfaat dari adanya pengembangan terhadap pariwisata yakni melahirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan ekonomi daerah meningkatkan kesejahteraan dari para penduduk maupun masyarakat (Ernawati et al. 2017)¹. Salah satu dari pada wujud pengembangan pariwisata adalah pengembangan desa menjadi obyek wisata. Beberapa tahun belakangan ini, desa wisata menjadi destinasi yang cukup terkenal di berbagai macam negara yang ada benua Eropa maupun Asia. Keberadaan perihal adanya desa wisata memberi peluang maupun kesempatan bisnis pada sektor pariwisata untuk para penduduk setempat bisa meningkatkan pendapatan mereka (Ciolac et al. 2017)².

UU No. 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan menyatakan pariwisata diartikan sebagai “berbagai macam kegiatan wisata serta didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Sedangkan wisata itu sendiri didefinisikan sebagai “kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara” (Haryanto, 2013)³.

Salah satu dari pada kebijakan pembangunan di dalam pariwisata yang digariskan pada RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional), yakni Pembangunan Destinasi Pariwisata yang diarahkan guna melakukan peningkatan terhadap daya tarik daerah tujuan wisata hingga bisa

¹ Ernawati et al. 2017

² Ciolac et al. 2017

³ Haryanto, 2013

bersaing di luar atau di dalam negeri, dengan rencana; (1) fasilitas pembangunan destinasi pariwisata nasional yang jadi fokus: (a) wisata budaya yang terdiri atas wisata religi serta heritage, wisata desa serta kota, wisata belanja serta kuliner; (b) wisata alam yang terdiri atas wisata ekologi, bahari, serta petualangan; serta (c) wisata buatan serta minat secara khusus yang terdiri atas wisata *Meeting Incentive Conference and Exhibition (MICE) & Event*, wisata kawasan terpadu, serta wisata olahraga; (2) meningkatkan citra dari kepariwisataan serta pergerakan para wisatawan yang ada di nusantara; (3) Tata Kelola Destinasi; (4) Pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam destinasi kepariwisataan. Jenis pariwisata yang bakal dikembangkan berguna para wisatawan dari negara mana saja yang meliputi: (a) wisata alam yang terdiri atas wisata ekologi, bahari serta juga petualangan; (b) wisata kebudayaan yang terdiri atas wisata religi serta heritage, wisata desa kota, wisata belanja serta kuliner; serta (c) wisata ciptaan yang terdiri atas wisata wisata olahraga, MICE & Event, wisata kawasan terpadu, serta juga wisata kebugaran dengan basis budaya nusantara (Kurniastuti, 2018)⁴.

DIY yang memiliki predikat sebagai kota wisata yang juga tidaklah luput dari yang nama kepopuleran desa wisata. Wujud atas aktivitas wisata dengan basis ekowisata maupun budaya banyak timbul, terutama yang ada pada Gunung Kidul serta Kab. Sleman. Perihal demikian diantaranya adalah didukung oleh rasa peduli dari para penduduk untuk terus menjaga kelestarian alam serta masih sangat cukup kental aspek budaya yang memberikan warna pada kehidupan bermasyarakat. Selain daripada demikian, arah pembangunan pariwisata DIY yang mengacu kepada Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2012 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY makin memantapkan arah pengembangan perihal kepariwisataan dengan berwawasan kebudayaan.

Di Kabupaten Sleman, jumlah dari pada desa wisata telah sampai dengan jumlah 47 desa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada di tahun 2018 yang hanya masihlah sebanyak 31 desa saja.

⁴ Kurniastuti, C. (2018). Pemilihan Strategi Pemasaran Desa Wisata Edukasi Dengan Metode Qspm.

Dari 31 jumlah desa itu ada berbagai macam klasifikasi desa wisata, yakni desa wisata mandiri dengan daya saing, tumbuh, berkembang, mandiri, serta desa wisata rintisan. Perkembangan desa wisata jadi salah satu dari pada indikasi bahwasanya telah ada kemajuan pada bidang pariwisata. Partisipasi para penduduk maupun masyarakat adalah ujung tombak dari pada kemajuan sebuah tempat wisata. Partisipasi secara aktif yang dilakukan oleh pihak-pihak penduduk maupun masyarakat bakal menguatkannya daya saing serta daya tawar dari desa wisata menjadi sebuah produk unggulan wisata. Oleh sebab demikian, dalam pengembangannya sebuah desa wisata, perihal utama yang wajib memperoleh perhatian dari para pelaku-pelaku wisata adalah partisipasinya para penduduk setempat (Ermando, 2019)⁵.

Edward Inskeep (1991) mengemukakan bahwa dalam bidang pariwisata, salah satu hal penting adalah adanya kelembagaan, hal itu dikarenakan adanya kelembagaan akan dapat menunjang kesuksesan dalam pariwisata. Kelembagaan akan berperan dalam mengatur banyak hal seperti aset distribusi manfaat untuk upaya peningkatan potensi pariwisata (Triambodo & Damanik, 2015). Adanya kelembagaan dalam bidang pariwisata akan menjadi wadah sekaligus penggerak dalam memfasilitasi serta mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang pariwisata (Triambodo & Damanik, 2015). Di dalam pengembangan kelembagaan, hal yang sangat diperlukan adalah perencanaan yang tepat dalam penentuan program kegiatan lembaga wisata tersebut. Hal itu dilakukan agar setiap program kegiatan memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan anggota dan masyarakat (Sastrayuda, 2010).

Kelembagaan wisata yang ada dalam suatu wilayah memiliki peranan sebagai penggerak masyarakat dalam daerah wisata demi tercapainya masyarakat yang sadar wisata menerapkan *Sapta Pesona* dalam lingkungannya. Dalam meningkatkan pemahaman tentang pariwisata, dalam pembangunan pariwisata, kelembagaan wisata harus meningkatkan partisipasi masyarakat berperan aktif.

⁵ Ermando, A. (2019). Bertambah signifikan, desa wisata di Sleman kini berjumlah 47. *Tribun Jogja*, 13 March. Di akses pada tanggal 1 Maret 2022.

Hal itu dilakukan guna mensukseskan pembangunan pariwisata. Dengan begitu adanya kelembagaan di suatu daerah akan dapat mendorong dalam pembangunan, mengembangkan, memajukan kepariwisataan, memanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Menurut Kaperda (2021), disebutkan bahwa desa penting sari mendapat penghargaan pada malam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021, yang resmi digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) pada Selasa (7/12/2021) di Gedung Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno⁶.

Dalam penelitian Wahyuni (2019)⁷ “Dengan judul Pengembangan Desa Wisata Pentingsari”, Kabupaten Sleman yang dilakukan dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat”. Dalam pengembangan tersebut, pengembangan dilakukan oleh pengelola desa wisata yang bekerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (pengelola desa wisata). Dalam penelitian tersebut pembangunan yang dilakukan mengusung konsep pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat menjadi komponen terpenting dalam pengembangannya. Selain itu hasil dari penelitian tersebut adalah, bahwa pengembangan Desa Wisata Pentingsari mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pentingsari, pemerintah daerah melalui partisipasinya dalam kegiatan wisata. Pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, sosialisasi ke masyarakat, pemerintah desa, pengambilan keputusan tentang pembentukan desa wisata.

Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan pemikiran, materi, terlibat langsung dalam setiap kegiatan

⁶<http://kaperda.jogjaprov.go.id/yogyakarta-raih-5-penghargaan-adwi-2021-1-penghargaan-internasional-untwo/>

⁷ Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10 (2): 91-106.

pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan desa wisata yang siap bersaing di industri pariwisata. Partisipasi dalam tahap menikmati hasil ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat Pentingsari akibat kegiatan wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati hasil dari kegiatan wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ditunjukkan melalui keterlibatannya dalam pertemuan rutin antar pengelola desa wisata, pemerintah desa, pemerintah daerah setempat (Wahyuni, 2019)⁸.

Sementara adapun desa wisata lain yang mendapat penghargaan pada malam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada 2021, yaitu desa wisata Nglanggeran. Desa Wisata Nglanggeran merupakan desa wisata yang berhasil menerapkan konsep ekowisata karena ketika wisatawan saat berada di Desa Wisata Nglanggeran tidak hanya datang, foto lalu pulang, tetapi dapat menikmati keindahan alam, belajar tentang alam, budaya, berbaur dengan masyarakat lokal. Desa Wisata Nglanggeran memiliki objek wisata unggulan yaitu Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang, Puncak Kampung Pitu, Produk olahan susu kambing dan produk olahan coklat khas Nglanggeran. Desa Wisata Nglanggeran juga memiliki aneka wisata seperti education tourism, culture tourism, adventure tourism, agro tourism dan green tourism. Semua aneka wisata ini bertujuan untuk wisatawan dapat membaur dengan alam, lingkungan masyarakat lokal dan budaya Desa Nglanggeran. Semua objek wisata yang dimiliki Desa Nglanggeran tidak lepas dari pengelola desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pengelola Desa Wisata) yang menjadi ujung tombak pengembangan desa wisata. (Rofiq & Prananta, 2021)⁹.

Dalam dua desa wisata yang telah disebutkan yaitu Desa Wisata Pentingsari Dan Desa Wisata Nglanggeran kesuksesannya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pengelola dan pengelola desa wisata serta partisipasi masyarakat.

⁸ Ibid hlm. 4

⁹ Rofiq, M. R., & Prananta, R. (2021). Jenis-jenis objek ekowisata dan peran kelompok sadar wisata (pokdarwis) Nglanggeran dalam pengelolaan ekowisata di desa wisata Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Tourism and Creativity* 5 (1).

Ketiga hal itu dalam pengembangan desa wisata saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena ketiga hal itu bergerak beriringan. Sementara dalam desa wisata Turgo yang berdiri pada tahun 2020, terletak di padukuhan turgo desa purwobinangun kecamatan pakem kabupaten sleman.

Desa wisata Turgo dikelola oleh pengelola desa wisata. Dalam penggalan data melalui wawancara narasumber dengan salah satu pengelola desa wisata dia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang, Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pembangunan wisata. Dari 185 kepala keluarga (KK) hanya 10% yang aktif berpartisipasi atau kurang lebih 18 kepala keluarga (KK). selain dari hasil wawancara penulis juga melakukan observasi, melihat belum banyak fasilitas wisata yang di bangun juga infrastruktur pendukung juga masih sedikit yang di bangun.

Dari hasil observasi dan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Wisata Turgo masih kurang. Dari masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dan pengupayaan yang dilakukan oleh pengelola dalam melakukan peningkatan terhadap partisipasi para penduduk ataupun masyarakat perihal pengembangan desa wisata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah pembentukan pengelola desa wisata ?
2. Apa saja daya tarik dan fasilitas pariwisata di Desa Wisata ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola desa wisata turgo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Wisata Turgo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pengelola desa wisata turgo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa tersebut.

D. Kerangka Berpikir

1. Pengelola Desa Wisata

Pearce (2013) membagi pengelolaan destinasi wisata ke dalam tiga bagian yakni tujuan, aktivitas wisata, struktur organisasi tata kelola. Tujuan diartikan sebagai sasaran atau target yang akan dicapai suatu organisasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Aktivitas dapat dimaknai sebagai segala usaha, program atau kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan organisasi pengelola destinasi. Umumnya, organisasi pengelola bidang pariwisata senantiasa menitikberatkan pada pentingnya mendorong masyarakat mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata serta pelestarian sumber-sumber pariwisata yang dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Pearce (2015) mengemukakan fungsi, peran organisasi pengelola destinasi sebagai berikut:

1. Organisasi tata kelola akan membantu dalam memasarkan, melakukan *branding* dan memposisikan (*positioning*) suatu destinasi.
2. Membantu mengembangkan dan atau mengelola produk yang dimiliki suatu destinasi.
3. Melakukan proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program kerja yang berkaitan dengan pariwisata suatu destinasi.
4. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata melalui peran fasilitator
5. Berperan dalam proses pemberian informasi kepada wisatawan serta membantu masyarakat dalam kegiatan sosialisasi urgensi dan manfaat pariwisata bagi masyarakat.

2. Desa wisata

Desa wisata yakni suatu wilayah ataupun kawasan yang memiliki keterkaitan pada bermacam-macam kearifan lokal (seperti budaya, adat istiadat, serta potensi) yang dikelola akan menjadi sebuah daya tarik wisata yang disesuaikan pada kemampuan yang dimiliki, yang diperlihatkan guna kepentingan dalam hal ekonomi serta sosial masyarakat. Sistem pengetahuan lokal maupun kearifan lokal yang dimaksudkannya adalah pengetahuan yang khas yang dimiliki suatu budaya maupun masyarakat secara terkhusus yang sudah berkembangnya sejak lama, menjadi hasil dari pada tahapan maupun proses dalam hubungan timbal balik diantara para penduduk dengan lingkungannya (Hermawan, H. 2016).¹⁰

Menurut Inskeep (1991)¹¹ desa wisata adalah sebuah wujud pariwisata, yang terdapat kelompok kecil wisatawan bertempat tinggal secara tradisional maupun pada desa yang terpencil serta memahami maupun mempelajarinya kehidupan yang ada di desa serta juga lingkungan sekitar desa tersebut. Menurut Nuryanti (1992)¹² desa wisata adalah sebuah wujud dari adanya integrasi antara akomodasi, atraksi, serta fasilitas pendukung yang diberikan pada sebuah struktur hidup penduduk yang menyatunya dengan tradisi serta tata cara yang ada maupun yang berlaku. Ditegaskannya juga bahwasanya komponen yang paling penting di dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yaitu sebagian dari pada lokasi dari tinggalnya para penduduk setempat serta unit-unit yang telah mengalami perkembangan sesuai pada tempat tinggalnya para masyarakat setempat, serta (2) atraksi, yaitu keseluruhan dari pada kehidupan yang ada di setiap harinya para penduduk lokal juga latar Àsik lokasi desa yang memungkinkannya dalam integrasi wisatawan sebagai partisipan yang aktif, layaknya kursus bahasa, tari, melukis, serta berbagai macam hal lain yang cukup spesifik pada bidangnya (Wahyuni, 2019)¹³.

¹⁰ Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata* 3(2): 105-117.

¹¹ Inskeep (1991). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *KAWISTARA* 3 (2): 117-226.

¹² Nuryanti (1992). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *KAWISTARA* 3 (2): 117-226.

¹³ Ibid hlm. 4

Menurut dari Prabowo dkk. (2016)¹⁴ mengemukakan bahwasanya Desa wisata adalah sebuah desa yang mempunyai keunikan serta potensi terhadap daya tarik wisata yang memiliki ciri khas baik berwujud kehidupan sosial budaya kemasyarakatan maupun karakteristik lingkungan alam pedesaan.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et al, 2015)¹⁵.

Menurut Ermando (2019)¹⁶, perkembangan dari pada desa wisata jadi salah satu dari indikator terhadap kemajuannya sektor kepariwisataan. Partisipasi dari para masyarakat adalah ujung tombak dari kemajuannya sebuah wisata. Partisipasi aktif masyarakat bakal membuat jauh lebih kuat terkait pada daya saing serta daya tawar desa wisata sebagai produk unggulan pariwisata. Oleh sebab demikian, dalam pengembangannya sebuah desa wisata, perihal utama yang wajib untuk diperoleh dalam mendapatkan perhatian dari para pelaku wisata adalah partisipasinya para penduduk setempat Wahyuni (2019)¹⁷.

Menurut dari Adiyoso (2009) menyatakan bahwasanya partisipasi masyarakat adalah suatu komponen yang paling penting perihal pengupayaan pertumbuhan kemandirian serta tahapan pemberdayaan. Pengabaian partisipasi dari para penduduk setempat atau lokal dalam pengembangannya desa wisata jadi permulaan perihal ketidaksuksesannya target maupun tujuan dari pengembangannya desa wisata (Nasikun, 1997)¹⁸.

¹⁴ Prabowo, S. E., Hamid, D., & Prasetya, A. (2016). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

¹⁵ Theresia, Aprilia et al. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: CV. Alvabeta.

¹⁶ Ibid hlm. 3

¹⁷ Ibid hlm. 4

¹⁸ Nasikun (1997) Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *KAWISTARA* 3 (2): 117-226.

Menurut Unapdi (1980) kegiatan masyarakat untuk pembangunan atau pengembangan suatu daerah yang menunjukkan suatu partisipasi masyarakat dibagi kedalam 4 hal yaitu (Theresia et all 2015) :

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi Masyarakat perlu ditambahkan melalui dibukanya suatu forum, di dalam forum tersebut masyarakat dapat berpartisipasi langsung untuk memberikan aspirasi, gagasan atau pendapat tentang program yang akan digunakan untuk proses pembangunan suatu wilayah.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah partisipasi masyarakat dalam program-program kerja yang berguna untuk untuk pembangunan masyarakat serta pemeliharaan dalam pemanfaatan hasil pembangunan agar manfaat dari pembangunan tersebut dapat terus dinikmati oleh masyarakat setempat.

c. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan sangat penting dilakukan agar tujuan dari pembangunan dapat tercapai dan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

d. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pemanfaatan hasil pembangunan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan dapat dinikmati di semua lapisan masyarakat.



Gambar 1.1
Bagan Kerangka Berpikir